




## FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF SOUTH SULAWESI

Mochamad Rizky Damara<sup>\*1</sup>, Haliah Haliah<sup>2</sup>, Andi Kusumawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Hasanuddin University, Indonesia

Corresponding Author: [mochrizkhyd@gmail.com](mailto:mochrizkhyd@gmail.com)

<b>Info Article</b>	<p><b>Abstract:</b> <i>The purpose of this study was to examine the financial performance of the local government of South Sulawesi Province in achieving good public financial management that can bring prosperity to the community. The analysis technique used is to calculate the degree of decentralization, the ratio of regional financial independence, efficiency, effectiveness, direct and indirect expenditure ratio, and growth ratio. The results of the analysis show that the ratio of the degree of decentralization is relatively stagnant from year to year with the ratio reaching 49%, indicating that the amount of local revenue is quite high compared to the total local revenue. The Regional Financial Independence Ratio shows that the government's ability to self-finance government activities, development and services to the 2016-2020 budget community has increased sufficiently, in 2020, the regional financial independence ratio still shows a consultative relationship pattern. The Regional Financial Effectiveness Ratio describes the local government's ability to realize the planned local revenue with the target set based on the real potential of the region, in the last five years, obtained an average ratio value of 94.25%, meaning that the PAD target set can be realized optimally and the Efficiency Ratio shows that is efficient.</i></p> <p><b>Abstrak:</b> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai pengelolaan keuangan publik yang baik yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menghitung tingkat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, efisiensi, efektivitas, rasio belanja langsung dan tidak langsung, serta rasio pertumbuhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Rasio derajat desentralisasi relatif mengalami stagnan dari tahun ke tahun dengan angka rasio mencapai 49% menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi dibandingkan dengan total Penerimaan Daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa kemampuan membiayai sendiri kegiatan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 2016–2020 cukup mengalami peningkatan, tahun 2020, rasio kemandirian keuangan daerah masih menunjukkan pola hubungan yang Konsultatif. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 5 tahun terakhir diperoleh nilai rerata sebesar 94,25% artinya target PAD yang ditetapkan sudah dapat direalisasikan secara maksimal dan Rasio Efisiensi menunjukkan sudah efisien.</p>
Received : 02 September 2024	
Revised : 03 Oktober 2024	
Accepted : 01 November 2024	
Publication : 30 November 2024	
<p><b>Keywords:</b> <i>Financial Performance, Local Government, Public Financial Management, Decentralization, Efficiency, Effectiveness, Regional Original Revenue</i></p>	
<p><b>Kata Kunci:</b> Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Publik, Desentralisasi, Efisiensi, Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah</p>	
<p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	

## INTRODUCTION

Pemerintah daerah adalah (PEMDA) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut menjadi acuan dalam memperkuat perwujudan desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat secara mandiri melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi hak, kewenangan, dan kewajiban pemerintah daerah.

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan budaya di Indonesia, Sulawesi Selatan berperan penting dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan penduduknya. Dalam beberapa tahun terakhir Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan yang signifikan baik dari segi jumlah penduduk, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Namun melihat perkembangan yang pesat tersebut Sulawesi Selatan tentunya menghadapi berbagai macam tantangan yang semakin kompleks dalam pengelolaan keuangan.

Menurut Mardiasmo, (2018) akuntansi sektor publik merupakan alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas serta pengendalian manajemen bagi pemerintah kepada masyarakat pada umumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dari laporan keuangan kemudian memberikan informasi kepada masyarakat.

Menurut Hutabarat, (2020) kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan telah menerapkan peraturan dengan menerapkan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik serta akurat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan alat bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja pada waktu sebelumnya dan memperbaikinya di masa yang akan datang.

Menurut Halim (2007) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis dan efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002). Menurut Mahmudi (2010) terdapat beberapa analisis rasio didalam pengukuran kinerja

keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rasio Kemandirian dihitung dengan cara perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat ditampilkan dalam Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 1.1 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25 –50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2007)

Menurut Anggriani (2010:174) *efektifitas* merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dengan dengan tujuan atau sasaran yang diharapkan. Dengan kata lain *efektifitas* adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar kontribusi hasil terhadap harapan atau tujuan atau target dari suatu kegiatan, semakin efektif organisasi tersebut, jadi *efektivitas* berfokus pada outcome atau

hasil yang terjadi. Suatu program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Dengan demikian maka pengukuran *efektifitas* dapat dilakukan dengan formula menurut Anggriani (2010:174) sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{\text{Jumlah Output yang dihasilkan}}{\text{Output yang diharapkan}}$$

Selanjutnya dalam pengukuran efektivitas, kriteria menurut Abdul Halim (2001:43) adalah apabila yang dicapai minimal satu atau 100% maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentase efektivitasnya menunjukkan pemungutan PAD semakin tidak efektif.

Tabel 1.2. Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan

<b>Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Efektivitas (%)</b>
Tidak Efektif	X < 100%
Efektif Berimbang	X = 100%
Efektif	X > 100%

Sumber: Abdul Halim (2001)

*Efisiensi* menurut Mardiasmo (2009:132) adalah hubungan antara output (barang dan jasa) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian maka pada prinsipnya *efisiensi* adalah ukuran perbandingan antara jumlah biaya dengan jumlah output yang dihasilkan dari biaya tersebut, jika diformulasi dalam persamaan matematis menurut Anggriani (2010:174) adalah sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{\text{Jumlah output yang dihasilkan}}{\text{Input (biaya) yang dikeluarkan}}$$

Tabel 1.3. Efisiensi Keuangan Daerah

<b>Efisiensi Keuangan Daerah</b>	<b>Rasio Efisiensi (%)</b>
Efisien	50%
Cukup Efisien	30%-50%
Tidak Efisien	30%

Sumber : Moh.Mahsun (2006)

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan publik yang berfungsi untuk mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan. Dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat dan tuntutan transparansi, peran analisis ini menjadi semakin krusial. Kinerja keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis yang mendalam, pemangku kepentingan dapat memahami kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan untuk menilai besarnya penyimpangan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Alexandre dkk. (2023) kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian kegiatan, program, dan strategi tertentu dengan tujuan, sasaran, visi dan misi, organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan organisasi.

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Sulawesi selatan dalam mencapai pengelolaan keuangan publik yang baik yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berharga bagi pengambilan kebijakan, praktisi, dan untuk meningkatkan kinerja fiskal pemerintah daerah di Indonesia.

## **METHOD**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan terhadap kinerja keuangan daerah provinsi Sulawesi Selatan

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut adalah data Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berupa data anggaran dan realisasi APBD serta pertumbuhan ekonomi K Provinsi Sulawesi Selatan. Periode data yang diambil adalah selama 5 (lima) tahun yaitu 2016-2020.

### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini data dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari data instansi-instansi yang terkait yaitu misalnya Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan cara menghitung derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, efisiensi, efektivitas, rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung, rasio pertumbuhan.

#### 1. Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

#### 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### 3. Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Output yang dihasilkan}}{\text{Output yang diharapkan}}$$

#### 4. Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Jumlah output yang dihasilkan}}{\text{Input (biaya) yang dikeluarkan}}$$

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **Results**

#### **Keuangan Daerah**

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan diupayakan ada kenaikan setiap tahun. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari

program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

## Discussion

### Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan 2016–2020 Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

Tabel 3.1 Derajat Desentralisasi

Tahun	PAD	Jumlah Pendapatan	Derajat Desentralisasi (%)
2016	3,8 Triliun	7,7 Triliun	49%
2017	4.2 Triliun	8.5 Triliun	49%
2018	4.5 Triliun	9.1 Triliun	49%
2019	4.8 Triliun	9.6 Triliun	50%
2020	4.0 Triliun	8.3 Triliun	48%
<b>Total</b>		<b>Rata Rata</b>	<b>49%</b>

Sumber : Data Diolah 2024

Rasio derajat desentralisasi Provinsi Sulawesi Selatan relatif mengalami stagnan dari tahun ke tahun. Bila dilakukan rata-rata rasio derajat desentralisasi selama 5 tahun terakhir, maka angka rasio ini mencapai 49%. Ini menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi dibandingkan dengan total Penerimaan Daerah.

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.

Berikut ini hasil analisis rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Laporan Realisasi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016–2020.

Tabel 3.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

<b>Tahun</b>	<b>Rasio Kemandirian</b>	<b>Pola Hubungan</b>
2016	49,35%	Konsultatif
2017	49,41%	Konsultatif
2018	50%	Konsultatif
2019	50%	Konsultatif
2020	48.19%	Konsultatif
<b>Total</b>		<b>Konsultatif</b>

Sumber : Data Diolah 2024

Berdasarkan perhitungan rasio Kemandirian Keuangan Daerah diatas bahwa kemampuan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2016–2020 cukup mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2020, rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih menunjukkan pola hubungan yang Konsultatif.

### **Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (Rasio EKD) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Dari perhitungan rasio EKD, dalam lima tahun terakhir diperoleh nilai rata-rata rasio EKD sebesar 94,25% artinya target PAD yang ditetapkan sudah dapat direalisasikan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah dan Rasio Efisiensi menunjukkan sudah efisien. Berikut rasio efektivitas dan efisiensi dalam lima tahun terakhir:

Tabel 3.3 Rasio *Efektivitas* dan *Efisiensi*

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>PAD</b>	<b>Rasio <i>Efektivitas</i></b>	<b>Pola Hubungan</b>
2016	4,0 Triliun	3,8 Triliun	95%	<i>efektif</i>
2017	4,5 Triliun	4,2 Triliun	93.33%	<i>efektif</i>
2018	4,8 Triliun	4,5 Triliun	93,75%	<i>efektif</i>
2019	5,0 Triliun	4,8 Triliun	96%	<i>efektif</i>
2020	4,3 Triliun	4,0 Triliun	93,2%	<i>efektif</i>

			<b>94,25%</b>	<i>efektif</i>
<b>Tahun</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>PAD</b>	<b>Rasio Efisiensi</b>	<b>Pola Hubungan</b>
2016	7,5 Triliun	3,8 Triliun	50,67%	<i>efisien</i>
2017	8,0 Triliun	4,2 Triliun	52,5%	<i>efisien</i>
2018	8,0 Triliun	4,5 Triliun	56,25%	<i>efisien</i>
2019	8,5 Triliun	4,8 Triliun	56,47%	<i>efisien</i>
2020	8,3 Triliun	4,0 Triliun	48,19%	<i>Cukup efisien</i>
			<b>52,81%</b>	<i>efisien</i>

Sumber : Data Diolah 2024

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya maka didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari rasio kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pola hubungan yang Konsultatif artinya daerah mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan suda dapat memaksimalkan secara efektif dalam pengelolaan target Pendapatan Asli Daerah
3. Dalam lima tahun terakhir, alokasi anggaran belanja tidak langsung masih lebih besar dibandingkan denga belanja langsung.
4. Dari rasio pertumbuhan bisa dilihat dari Pendapatan Asli Daerah masih menunjukkan hasil negative pada tahun 2019 dan 2020.

## REFERENCES

- Anggriani (2010), ANGGARAN BERBASIS KINERJA : PENYUSUNAN APBD SECARA KOMPREHENSIF, Edisi I, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta.
- Departemen Keuangan RI. 2009. Buku 2: PEDOMAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBK). Jakarta.([http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/buku\\_2.pdf](http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/buku_2.pdf),diakses 8 September 2015)
- Halim, Abdul (2007), SERI BUNGA RAMPAI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Edisi Kedua. Yogyakarta, UPPSTIM YKPN

Halim, Abdul (2001), BUNGA RAMPAI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH,  
Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Mahmudi, (2007). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.  
Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mardiasmo. (2002). OTONOMI DAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH. Andi,  
Yogyakarta

Mardiasmo. (2009). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Yogyakarta : CV Andi Offset

Mahmudi, (2010). MANAJEMEN KINERJA SEKTOR PUBLIK, edisi revisi.  
Yogyakarta: UPP STIM YKPN